

**EVALUASI KEBIJAKAN
PENGELOLAAN SAMPAH DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA
TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Muhammad Fadhil Riwandi

NPP. 31.0177

AsdafKota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: fadhil.bedil16@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Selvia Junita Praja, S.IP., M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The author highlights the problem in evaluating waste management in the environmental service of the city of Tanjungpinang, Riau Islands province, which still faces many obstacles. **Purpose:** This research aims to find out and analyze the evaluation of waste management policies in Tanjungpinang City, Riau Islands Province. and to find out and analyze the efforts of the Tanjungpinang City Environmental Service in overcoming obstacles to the implementation of waste management policies in Tanjungpinang City, Riau Islands Province. **Method:** using William N. Dunn's theory with qualitative research descriptive method. Data collection is done by interview, observation, and documentation techniques. The data was then analyzed using data condensation, data presentation, and conclusion drawing techniques. **Results:** The research shows that the Evaluation of Waste Management Policy in Tanjungpinang City has not run optimally in terms of budget, human resources, and infrastructure. The efforts made are to provide education to the people of Tanjungpinang City, improve and optimize facilities and infrastructure, facilities, and qualified human resources. And also improve the waste management system to create a clean and healthy environment in Tanjungpinang City, thus supporting the achievement of overall policy objectives. **Conclusion:** Evaluation of Waste Management Policy in Tanjungpinang City shows that the policy has not run optimally, especially in terms of budget, human resources, and infrastructure. The allocated budget is still inadequate, so many programs cannot run optimally. The human resources involved are also limited, both in number and quality. Available facilities and infrastructure, such as temporary disposal sites (TPS), waste transportation fleets, and recycling facilities, are also lacking. To improve this condition, the government is educating the public to be more aware of the importance of waste management. In addition, improvement and optimization of infrastructure facilities are needed by adding more polling stations, transport fleets, and recycling facilities. Increasing the capacity of human resources is also important by providing training and increasing the number of officers. The implementation of a better waste management system, including scheduled waste collection and transportation and environmentally friendly processing, is expected to create a clean and healthy environment in Tanjungpinang City. Thus, the overall goal of waste management policy can be achieved, creating a clean, healthy and sustainable environment.

Keywords: Evaluation, Policy, Waste Management

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis menyoroti masalah dalam evaluasi pengelolaan sampah di dinas lingkungan hidup kota tanjungpinang provinsi kepulauanriauyang masih menghadapi banyak kendala. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dalam mengatasi faktor penghambat berjalannya kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. **Metode:** menggunakan teori William N.Dunn dengan penelitian kualitatif metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data kemudian dianalisis dengan teknik kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Penelitian menunjukkan menunjukkan bahwa Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Tanjungpinang belum berjalan dengan optimal dari segi anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana. Upaya yang dilakukan yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat Kota Tanjungpinang, meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana, fasilitas, serta SDM yang mumpuni. Dan juga meningkatkan sistem pengelolaan sampah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat di Kota Tanjungpinang, sehingga mendukung pencapaian tujuan kebijakan secara keseluruhan.

Kesimpulan: Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Tanjungpinang menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum berjalan optimal, terutama dalam hal anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana. Anggaran yang dialokasikan masih belum memadai, sehingga banyak program tidak bisa berjalan maksimal. Sumber daya manusia yang terlibat juga terbatas, baik jumlah maupun kualitasnya. Sarana dan prasarana yang tersedia, seperti tempat pembuangan sementara (TPS), armada pengangkut sampah, dan fasilitas daur ulang, juga sangat kurang. Untuk memperbaiki kondisi ini, pemerintah melakukan edukasi kepada masyarakat agar lebih sadar pentingnya pengelolaan sampah. Selain itu, peningkatan dan optimalisasi sarana prasarana sangat diperlukan dengan menambah TPS, armada pengangkut, dan fasilitas daur ulang. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga penting dengan memberikan pelatihan dan menambah jumlah petugas. Penerapan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik, termasuk pengumpulan dan pengangkutan sampah yang terjadwal serta pengolahan ramah lingkungan, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat di Kota Tanjungpinang. Dengan demikian, tujuan kebijakan pengelolaan sampah dapat tercapai secara keseluruhan, menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Evaluasi, Kebijakan, Pengelolaan Sampah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia mengadopsi Pancasila sebagai ideologi, yang menjadi dasar kehidupan masyarakat dan negara. Visi negara tercermin dalam Pembukaan UUD 1945, yang mencakup perlindungan negara dan rakyat, peningkatan kesejahteraan umum, peningkatan kecerdasan nasional, serta partisipasi dalam dunia internasional berdasarkan keadilan sosial, kebebasan, dan perdamaian. Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak tiap individu atas layanan kesehatan, tempat tinggal nyaman, lingkungan hidup sehat, dan kebahagiaan jasmani serta rohani. Faktor seperti rumah, gaya hidup, dan manajemen sampah mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. Sampah, yang merupakan sisa padat dari aktivitas alam dan manusia, diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Penanganan sampah meliputi pemindahan ke TPS,

pengolahan di TPA, dan pengangkutan oleh Dinas Lingkungan Hidup, dengan kategori mulai dari sampah rumah tangga hingga sampah berbahaya dan beracun.

Pengelolaan sampah di Indonesia terdiri dari manajemen sampah rumah tangga dan manajemen sampah terkait lainnya, yang mencakup pengurangan sampah, daur ulang, dan penggunaan kembali limbah. Menurut Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pengelolaan sampah adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan individu. Beberapa jenis sampah memerlukan perawatan khusus karena sifat, konsentrasi, atau volumenya.

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020, mengatur pengelolaan sampah spesifik. Limbah yang tidak dapat dikelola secara teknologi harus diurus oleh pemerintah di semua level sesuai standar yang ditetapkan. Partisipasi masyarakat dan pelaku bisnis dalam pengelolaan sampah meliputi sortir, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pengolahan akhir sampah secara aman ke lingkungan. Proses pemilihan sampah dilakukan dengan memisahkan sampah berdasarkan kategori organik (basah), anorganik (kering), dan B3 (bahan beracun dan berbahaya). Pemisahan ini bisa dimulai sejak dari sumbernya, seperti rumah tangga, sekolah, fasilitas umum, dan sebagainya (Firmanti et al., 2010).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menggariskan strategi untuk mengelola sampah dengan fokus pada pengurangan limbah. Untuk memudahkan pengelolaan sampah, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Peraturan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). SIPSN ini dirancang untuk menyatukan informasi pengelolaan sampah dari berbagai sumber, meliputi asal, penciptaan, struktur, ciri khas sampah, sarana pengelolaan, dan data tambahan yang diperlukan. Pemerintah lokal tingkat kabupaten/kota dan provinsi, melalui Pimpinan Pasukan Penataan Sampah, wajib menyuguhkan data yang dicatat dalam SIPSN. Indonesia, dengan populasi mencapai 278,7 juta jiwa, adalah negara keempat terpadat di dunia (BPS.go.id, 2023). Kepadatan penduduk mempengaruhi jumlah sampah yang dihasilkan setiap individu setiap harinya. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada tahun 2021, Indonesia menghasilkan sekitar 21 juta ton sampah (Saitullah, 2022). Berikut data timbulan sampah serta jumlah penduduk di Kota Tanjungpinang:

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Tabel 1

Data Timbulan Sampah di Kota Tanjungpinang

Tahun	Provinsi	Kabupaten /Kota	Timbulan sampah tahunan (ton/tahun)	Jumlah Penduduk (jiwa)
2019			52.387,65	220.812
2020	Kepulauan	Tanjungpinang	54.013,05	227.663
2021	Riau		55.366,32	233.367
2022			56.905,36	239.854

Sumber : SIPSN, PMD Kota Tanjungpinang, 2023

Penduduk Kota Tanjungpinang meningkat dari 227.663 jiwa pada 2020, bertambah 5.704 jiwa pada 2021, dan 6.487 jiwa pada 2022. Dengan total 240.854 jiwa, Tanjungpinang adalah kota dengan populasi tertinggi ketiga di Provinsi Kepulauan Riau. Pada 2022, produksi sampah mencapai 56.905,36 ton dan diperkirakan terus meningkat seiring pertumbuhan populasi. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup menyoroti korelasi ini, yang juga didukung data dari SIPSN. Pertumbuhan penduduk mengakibatkan peningkatan volume sampah, menimbulkan masalah

lingkungan seperti gangguan kesehatan, pencemaran, dan kebutuhan lahan TPA yang lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan sampah yang efektif.

Sampah di Kota Tanjungpinang meningkat setiap hari. Pembuangan sampah sembarangan dan pengelolaan yang kurang baik menyebabkan masalah lingkungan yang berkelanjutan dan berdampak signifikan bagi masyarakat. Provinsi Kepulauan Riau menempati urutan ke-17 dalam jumlah sampah terbanyak di Indonesia dengan 163.747,65 ton/tahun. Pegawai kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dituntut meningkatkan kebersihan dan kelestarian lingkungan. Manajemen pengelolaan sampah harus mempertimbangkan pertumbuhan populasi, kondisi sosial ekonomi, dan perkembangan teknologi. Ini penting untuk mencegah penyakit, menjaga kelestarian lingkungan, estetika, dan sumber daya alam.

Tabel 1

Capaian Pengurangan Dan Penanganan Sampah Kota Tanjungpinang

INDIKATOR	PERIODE	TARGET (ton/tahun)	CAPAIAN (ton/tahun)	PERSENTASE (%)
Pengurangan	Semester I Tahun 2021	12.963,13	10.721,46	82,71
	Semester II Tahun 2021	12.963,13	11.812,73	91,13
	Semester I Tahun 2022	17.994,00	12.455,23	69,22
	Semester II Tahun 2022	17.994,00	13.196,00	73,34
Penanganan	Semester I Tahun 2021	39.969,66	32.667,50	81,70
	Semester II Tahun 2021	39.969,66	32.302,50	80,82
	Semester I Tahun 2022	50.521,63	32.083,50	63,51
	Semester II Tahun 2022	50.521,63	32.982,60	65,30

Sumber : SIPSN, PMD Kota Tanjungpinang, 2023

Berdasarkan data Tabel 1.2, Kota Tanjungpinang belum mencapai target pengurangan dan pengelolaan sampah pada triwulan I tahun 2021, dengan pencapaian hanya 82,71% untuk pengurangan dan 81,70% untuk pengelolaan sampah. Grafik menunjukkan ketidakstabilan dan penurunan antara periode 2021-2022, mengindikasikan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan kebijakan yang diatur oleh Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan ini menetapkan tanggung jawab pemerintah daerah untuk pengelolaan sampah dengan pendekatan lingkungan dan menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap, tetapi implementasinya masih kurang efektif.

Meskipun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerima laporan dari aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) di Kota Tanjungpinang, hasilnya masih belum memenuhi target. Data menunjukkan bahwa jumlah sampah meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, dan pencapaian target mengalami fluktuasi dan penurunan antara tahun 2021 dan 2022. Data terbaru bisa diperoleh setelah persetujuan dari Dinas Lingkungan Hidup

setempat. Aplikasi SIPSN diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan sampah, meningkatkan pelayanan pemerintah, dan menyediakan lingkungan yang bersih dan sehat.

Tabel 2

Sarana Dan Prasarana Di Kota Tanjungpinang Tahun 2022

SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
Bank Sampah	59 unit
Dump Truck	20 unit
Armroll Truck	10 unit
Buldozer	2 unit
Excavator	1 unit
Loader	1 unit
Mobil Tangki Tinja	2 unit
Bemo	1 unit
Sepeda Motor	2 unit
Mesin Pemootong Rumput	2 unit

Sumber : SIPSN, PMD Kota Tanjungpinang, 2023

Berdasarkan tabel 1.3, sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang belum memadai. Terdapat hanya dua jenis kendaraan untuk mengangkut sampah, dan truk hanya menjangkau rumah atau kantor di tepi jalan raya, sehingga rumah di jalan kecil harus membuang sampah sendiri. Selain itu, hanya ada satu buldozer yang berfungsi dengan baik. Pengangkutan sampah dilakukan dua kali sehari, pagi dan sore, dengan retribusi Rp20.000,- per bulan. Warga yang tidak terlayani merasa keberatan dan enggan membayar retribusi karena ketidakmerataan fasilitas. Permasalahan sampah di Kota Tanjungpinang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat tentang retribusi dan pemilahan sampah. Pemilahan yang dilakukan masyarakat sering kali tidak diikuti dengan pemisahan oleh petugas, karena kurangnya fasilitas. Selain itu, sampah pasar yang cepat menumpuk dan sampah laut dari wilayah lain memperburuk situasi. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) hampir penuh, dengan metode pengolahan seperti open dumping yang berdampak negatif pada lingkungan, sedangkan sanitary landfill lebih terkelola. Hambatan utama dalam pengelolaan sampah meliputi kurangnya fasilitas, infrastruktur, dan kesadaran masyarakat. Kualifikasi tenaga kerja juga belum memadai, dan penutupan area sampah sering kali tidak dilakukan. Jika Dinas Lingkungan Hidup dapat mengelola sampah secara efektif dan masyarakat lebih disiplin, masalah sampah di Tanjungpinang dapat diminimalisir.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penyajian penelitian sebelumnya bertujuan untuk mendapatkan suatu bahan referensi dan komparatif, Selain itu, untuk menghindari terjadinya plagiasi ataupun kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Dengan demikian analisis ini akan menunjukkan persamaan dan perbedaan riset sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Pertama, Jurnal, Muhammad Rapii, Muhammad Zainul Majdi, Rohaeniah Zain, dan Qurratul Aini, 2021, "Pengelolaan Sampah Secara Terpadu Berbasis Lingkungan Masyarakat Di Desa Rumbuk". Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan kepeduliannya terhadap mengelola sampah, mengajarkan masyarakat untuk mengelola sampah secara terpadu secara kompak dengan bekerja sama dan gotong royong. Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya mengetahui cara menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan salah satunya dengan mengolah sampah rumah tangga menjadi kompos (Rapii, M.,

Madji, M.Z., Zain, R dan Aini, Q. 2021). Kedua, Skripsi, Rafael Tatibo, 2018, “Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende dalam Pengelolaan Sampah (Studi Kasus di Empat Kecamatan dalam Kota)”. Tujuannya untuk menunjukkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende dalam mengelola sampah. Untuk memperoleh gambaran tentang kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende dalam pengelolaan sampah, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari informan, sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui dokumen – dokumen resmi dari kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende terkait dengan penelitian ini. Hasilnya produktivitas dalam pengelolaan sampah masih rendah, dengan kegiatan yang dilaksanakan memiliki dampak yang minim terhadap masyarakat, sehingga jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat terus meningkat (Rafael Tatibo 2019).Ketiga, Jurnal, Junaidy, Sugianor, Dely Anhar, Akhmad Nihrawi Hamdie, Syahrial Saddiq, 2021, “Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kapuas”. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana evaluasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kapuas. Hasil penelitiannya bahwa evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kapuas telah berjalan namun kurang maksimal dikarenakan masih adanya masalah pada kriteria evaluasi yaitu responsivitas seperti kurangnya kesadaran dan disiplin masyarakat dalam mengikuti aturan waktu pembuangan sampah yang mengakibatkan masih tertinggalnya sampah sisa di Tempat Pembuangan Sampah sementara.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memperkenalkan pendekatan inovatif dalam menilai kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, melalui analisis multidimensional yang mencakup efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi fenomena yang ada di masyarakat, dengan tujuan mengumpulkan data untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang situasi di lapangan. Penelitian ini dianggap sebagai metode untuk mengungkap atau memperjelas kebenaran (Moleong, 2019).

Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi faktor-faktor lokal yang memengaruhi penerapan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang, tetapi juga memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk memperbaiki koordinasi antar-instansi dan meningkatkan partisipasi masyarakat.. Rekomendasi yang diberikan bertujuan untuk memperkuat sinergi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah, seperti pemerintah kota, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal. Hal ini mencakup peningkatan komunikasi dan kerjasama, penyediaan fasilitas yang lebih memadai, dan pelibatan masyarakat dalam proses pengelolaan sampah, seperti pemilahan dan pengurangan sampah di sumbernya.

Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi yang berarti terhadap pengembangan kebijakan yang lebih responsif dan adaptif, yang dapat mengatasi tantangan dinamis lingkungan dan sosial di Kota Tanjungpinang. Dengan pendekatan ini, diharapkan kebijakan pengelolaan sampah dapat lebih efektif dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Data penelitian disajikan dalam format deskriptif, mencakup informasi tertulis dan lisan yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber serta observasi lapangan. Dokumentasi juga digunakan untuk memperkuat temuan dan analisis. Proses analisis didasarkan pada teori evaluasi kebijakan William N. Dunn, yang melibatkan enam dimensi utama: efektivitas (seberapa baik kebijakan mencapai tujuannya), efisiensi (seberapa optimal sumber daya digunakan), kecukupan (apakah kebijakan mencukupi kebutuhan), pemerataan (apakah distribusi manfaat adil), responsifitas (seberapa cepat dan tepat kebijakan merespons perubahan), dan ketetapan (apakah

kebijakan konsisten dan berkelanjutan

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dalam mengatasi faktor penghambat berjalannya kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.

II. METODE

Sebelum penelitian dimulai, penting untuk memilih pendekatan yang tepat. Pendekatan ini membantu merumuskan masalah dan menentukan metode yang sesuai. Menurut Creswell, pendekatan penelitian mencakup semua tahapan dari perencanaan hingga pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Pilihan pendekatan bergantung pada asumsi filosofis, sifat masalah, pengalaman peneliti, dan audiens target (Creswell, 2018). Metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan induktif, fokus pada proses dan makna dari perspektif subjek. Menurut Creswell, penelitian kualitatif bertujuan untuk menyelidiki dan memahami makna individu atau kelompok terkait isu sosial atau masalah manusia (Creswell, 2014). Deskriptif adalah metode pengumpulan data yang menggambarkan informasi dengan menggunakan kata-kata dan gambar. Penelitian deskriptif umumnya digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti dokumen, catatan lapangan, foto, video, wawancara, dan catatan lainnya (Nugroho, 2021). Data adalah gabungan datum dari banyaknya fakta empirik yang disatukan oleh penulis untuk kepentingan menyelesaikan permasalahan atau menjawab pertanyaan penelitian” (Simangungsong, 2016). Pendekatan kualitatif juga membantu menganalisis bagaimana kebijakan penanggulangan bencana dijalankan. Penelitian kualitatif dilakukan di lingkungan alami sehingga data yang diperoleh bersifat alami, tanpa manipulasi, dan terbuka (Fernandes, 2017). Tahap pengumpulan data adalah bagian krusial dalam penelitian, bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif, terdapat berbagai teknik pengumpulan data, termasuk wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen. (Sugiyono.2019). Wawancara dilakukan terhadap kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang, Penanggung Jawab Pengelolaan Sampah di TPA, Masyarakat yang terdampak di Kota Tanjungpinang. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Analisis dilakukan dengan merujuk pada teori evaluasi kebijakan William N. Dunn, yang mencakup enam dimensi: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsifitas, dan ketetapan.

3.1. Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan memanfaatkan data lapangan yang disesuaikan dengan konsep yang dikemukakan oleh William Dunn. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi di lokasi penelitian, lalu diproses melalui langkah-langkah reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggambarkan data dalam bentuk naratif. Evaluasi adalah suatu kegiatan sistematis dan terencana untuk mengukur, menilai dan klasifikasi pelaksanaan dan keberhasilan program (Sudijono, 2009). Menurut Lester dan Stewart, bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan (Leo Agustino, 2008). Evaluasi terhadap keberhasilan kebijakan manajemen sampah di Kota Tanjungpinang merujuk pada model evaluasi kebijakan yang dikembangkan oleh William N. Dunn. Model ini menekankan enam variabel utama untuk menilai kesuksesan suatu kebijakan, yakni:

3.1.1 Efektivitas (*Effectiveness*)

Efektivitas adalah salah satu kriteria utama dalam evaluasi kebijakan publik, yang mengukur sejauh mana kebijakan mencapai tujuannya. Dalam evaluasi, efektivitas menilai apakah kebijakan berhasil mencapai sasaran dan dampaknya terhadap masyarakat (Dunn, 2018). Efektivitas juga berkaitan dengan efisiensi, yang membandingkan hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan. Suatu kebijakan dianggap efektif jika tujuan tercapai dengan penggunaan sumber daya yang efisien.

Tabel 4
Target dan Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah Tahun 2023

Indikator	Target		Capaian	
	Ton/Tahun	%	Ton/Tahun	%
Timbulan	70.938	-	55.716	-
Pengurangan	19.153	27	13.101	24
Penanganan	51.075	72	35.586	64

Sumber : SIPSN, PMD Kota Tanjungpinang 2024

Untuk melihat bagaimana laporan target serta capaian pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang, dapat dilihat pada tabel 4.3 diatas. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa hasil yang ada tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tentunya ada beberapa faktor penghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang. Faktor tersebut diperlihatkan pada tabel 4.4 dibawah ini.

Tabel 5
Identifikasi Permasalahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang

Aspek kajian	Faktor mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
	internal	eksternal	
Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Kurangnya sarana dan prasarana, pembinaan, monitoring dan evaluasi	Kurangnya dukungan dari berbagai pihak	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang masih belum efektif. Indikasi ketidakefektifan ini mencakup beberapa aspek utama. Pertama, target pengurangan volume sampah tidak tercapai, meskipun ada upaya untuk mengurangi jumlah sampah. Kedua, jumlah sampah yang dihasilkan terus meningkat setiap tahunnya, menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil belum berhasil mengendalikan pertumbuhan sampah. Ketiga, terdapat kekurangan sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah, seperti alat angkut yang tidak memadai dan fasilitas pengolahan yang terbatas, yang membatasi kemampuan pengelolaan secara efektif. Selain itu, berbagai hambatan internal dan eksternal mengganggu efektivitas, termasuk kekurangan pembinaan dan kurangnya monitoring serta evaluasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dukungan dari pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor privat, juga belum optimal, yang menghambat koordinasi dan sinergi dalam pengelolaan sampah. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah turut berkontribusi pada masalah ini, mengakibatkan partisipasi yang rendah dalam pemilahan dan pengurangan sampah di sumbernya. Untuk meningkatkan efektivitas, perlu dilakukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan infrastruktur dan fasilitas, implementasi program pembinaan dan monitoring yang berkelanjutan, peningkatan dukungan dan kolaborasi antar pihak, serta penyelenggaraan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

3.1.2. Efisiensi (Efficiency)

Efisiensi mengukur seberapa baik sebuah kebijakan mencapai tujuannya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Dalam kebijakan publik, efisiensi menilai apakah suatu program atau kebijakan mencapai tujuannya dengan biaya yang paling rendah dan manfaat yang terbesar. Evaluasi efisiensi mencakup perhitungan biaya dan manfaat serta mencari cara untuk mengurangi biaya dan meningkatkan manfaat. Ini juga melibatkan membandingkan alternatif kebijakan untuk memilih yang paling efisien (Dunn, 2018).

Tabel 6

Indikator Permasalahan yang dialami Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang

no	INDIKATOR PERMASALAHAN	KETERANGAN
	SDM, Sarana dan Prasarana	Dari segi kuantitas, terdapat kekurangan sumber daya manusia yang mengurus masalah lingkungan. Dari segi kualitas, perlu dilakukan peningkatan pada sumber daya manusia yang terlibat dalam penanganan lingkungan. Sarana dan prasarana

		saat ini masih belum memadai jika dibandingkan dengan standar idealnya.
	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Kurangnya fasilitas, koordinasi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Masih kurang maksimalnya kemampuan aparat dalam perencanaan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Tabel 7
Jumlah Anggaran dan Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Sampah di Dinas

NO	JENIS	ANGGARAN (Rp)	SDM (orang)
1	Anggaran Pengelolaan Sampah dan Kebersihan	7.862.658.622	462
2	Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup	1.033.882.524	
3	Anggaran Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.483.344.972	
4	TPA Pemda (APBD Pemerintah Kab/Kota)	1.112.124.000	

Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2023

Sumber : SIPSN, PMD Kota Tanjungpinang 2024

Berdasarkan data yang telah disajikan pada tabel 4.5 dan 4.6, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini kurang berhasil dilaksanakan dengan efisien dalam hal penggunaan SDM (sumber daya manusia), anggaran serta sarana dan prasarana yang ada. Faktanya, terdapat penurunan dalam tingkat pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang setiap tahunnya, yang disebabkan oleh kekurangan sumber daya manusia yang menangani isu lingkungan. Sumber daya manusia yang tersedia belum mempunyai kemampuan dalam mengatasi isu lingkungan, dan juga sarana serta prasarana yang ada bisa dikatakan belum memadai.

3.1.3. Kecukupan (*Adequacy*)

Kecukupan mencerminkan seberapa baik kebijakan dapat memenuhi kebutuhan dan ekspektasi masyarakat atau kelompok yang menjadi sasarannya. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kecukupan digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang telah ditetapkan cukup untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam menyelesaikan masalah yang ada. (Dunn, 2018).

Tabel 8
Jumlah Sarana Dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023

SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
Bank Sampah	65 unit
Dump Truck	20 unit
Armroll Truck	10 unit

Pickup	2 unit
Motor Roda 3	2 unit
Buldozer	2 unit
Excavator	1 unit
Loader	1 unit
Mobil Tangki Tinja	2 unit
Bemo	1 unit
Sepeda Motor	2 unit
Mesin Pemotong Rumput	2 unit

Sumber : SIPSN, PMD Kota Tanjungpinang 2024

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, anggaran yang didapat Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan tabel 4.6 sudah cukup untuk menyediakan Bank Sampah serta sarana prasarana oleh DLH Kota Tanjungpinang dalam pengelolaan sampah, Sumber daya manusia juga menjadi pengaruh bagi evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang. Berikut merupakan data tenaga kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang yang tercatat sampai tanggal 1 Maret 2024:

Tabel 9
Rekapitulasi Data THL DLH 1 Maret 2024

No	Jenis THL	Jumlah
1	Tenaga Kantor	9
2	Satpam	1
3	Petugas TPA	16
4	Operator Alat Berat	6
5	Nahkoda Boat	4
6	Tenaga Kebersihan (Petugas Pantai)	14
7	Tenaga Kebersihan (Cucian Kendaraan)	3
8	Tenaga Kebersihan (Penjaga Bak/TPS)	25
9	Tenaga Kebersihan (Supir Lori)	26
10	Tenaga Kebersihan (Supir Lori Air)	1
11	Tenaga Kebersihan (Anggota Lori)	69
12	Tenaga Kebersihan (Petugas Sapu)	151
Total		325

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, petugas dan tenaga kerja dirasa mencukupi dari segi kuantitas. Tenaga kebersihannya pun beragam mulai dari petugas pantai, supir lori, petugas sapu dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang telah mencapai tingkat yang memadai. Pengembangan infrastruktur seperti Tempat Pembuangan Sampah (TPS) kini hampir merata di seluruh pemukiman warga, memastikan akses yang lebih baik bagi masyarakat dalam membuang sampah. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga telah mendekati jumlah yang memadai, yang mendukung operasional pengelolaan sampah secara efisien. Selain itu, jadwal pengangkutan sampah telah diatur dengan baik, memastikan bahwa sampah diangkut secara rutin dan tepat waktu. Masyarakat juga menunjukkan kepatuhan dengan membuang sampah secara teratur sesuai dengan jadwal dan peraturan yang berlaku, yang membantu meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan sampah di kota ini. Dengan kondisi ini, pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang

berjalan dengan lebih terstruktur dan efisien, meskipun tetap diperlukan upaya berkelanjutan untuk mengatasi tantangan yang ada.

3.1.4. Kemerataan (*Equity*)

Perataan dalam kebijakan publik mengacu pada keadilan dalam mendistribusikan layanan atau manfaat kepada semua masyarakat atau kelompok sasaran secara merata (Dunn, 2018). Kebijakan yang adil memastikan bahwa manfaat dan biaya didistribusikan secara seimbang, tanpa adanya ketimpangan antara wilayah atau kelompok masyarakat. Pelaksanaan kebijakan harus memastikan bahwa semua sektor masyarakat merasakan dampak yang sama, sehingga tidak ada perbedaan signifikan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Dengan kebijakan yang adil, masyarakat akan lebih mendukung dan mempercayai pemerintah, karena merasa mendapatkan perlakuan yang setara.

Tabel 10
Daftar Sebaran TPS atau Bank Sampah Di Kota Tanjungpinang Tahun 2024

KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA	JUM LAH
SEI JANG		Bank Sampah Ceria	10
		Bank Sampah Kampung Kolam Nirwana	
		Bank Sampah Menur Indah	
		Bank Sampah Tanggul Das	
		Bank Sampah Tanjung Harapan	
		Bank Sampah Cermai	
		Bank Sampah Berkah	
		Bank Sampah Hilir Das	
		Bank Sampah Lestari	
		Bank Sampah Rawa Das	
BUKIT BESTARI	DOMPAK	Bank Sampah Anak Dare	5
		Bank Sampah Bintang Siambang	
		Bank Sampah Sei Jari	
		Bank Sampah Smart Kepri	
		Bank Sampah Seisudip Mandiri	
TANJUNG AYUN SAKTI		Bank Sampah Asoka	2
		Bank Sampah Bima Sejahtera	
		Bank Sampah Gudang Minyak	
TG UNGGAT		Bank Sampah Induk Berseri	6
		Bank Sampah Kenanga	
		Bank Sampah Kenanga	
		Bank Sampah Kombes GO	
TPI TIMUR		Bank Sampah Tanjung Unggat Berseri	1
MKP		Bank Sampah Kayu Putih	8
		Bank Sampah Kembar Mandiri	
		Bank Sampah Kuantan Bersih	
		Bank Sampah Wonosari Asri	
		Bank Sampah Bersih Itu Sehat	

		Bank Sampah Hijau Bumi	
		Bank Sampah Permata	
		Bank Sampah Pahlingsih	
		Bank Sampah Suka Jaya	
	KAMPUNG BULANG	-	-
	AIR RAJA	Bank Sampah Banjar Berseri	2
		Bank Sampah Pemuda Pancasila	
	BATU IX	Bank Sampah Berkah Bangun Bersama	5
		Bank Sampah Pinang Merah Indah	
		Bank Sampah STAI Miftahul Ulum	
		Bank Sampah Mekar Jaya	
		Bank Sampah Banyu Biru	
	PINANG KENCANA	Bank Sampah Bintang Permai	9
		Bank Sampah Hang Tuah	
		Bank Sampah Kiken	
		Bank Sampah Lestari	
		Bank Sampah Mandiri	
		Bank Sampah Resik Becik	
		Bank Sampah Berlian Bumi Air Raja	
		Bank Sampah Sampah Semesta	
		Bank Sampah Mitra Bahasa Sejahtera	
	TANJUNGPINANG KOTA	Bank Sampah Kelurahan Tanjungpinang Kota	1
		Bank Sampah Kampung Mandiri	5
		Bank Sampah Semoga Berkah	
	KAMPUNG BUGIS	Bank Sampah Buah Pesisir	
		Bank Sampah Kecamatan Tanjungpinang Kota	
		Bank Sampah Kelurahan Kampung Bugis	
		Bank Sampah Asri Jaya	4
	SENGGARANG	Bank Sampah Kelurahan Senggarang	
		Bank Sampah Sebaik Indah	
		Bank Sampah Kalpataru	
	PENYENGAT	Bank Sampah Kelurahan Penyengat	2
		Bank Sampah Punye Kite	
	TANJUNGPINANG BARAT	Bank Sampah Remaja Mandiri	1
	TANJUNGPINANG BARAT	KAMBOJA Bank Sampah Ahmad Potong Lembu	1
		KAMPUNG BARU Bank Sampah Sejati	1
		BUKIT CERMIN Bank Sampah Kita Maju Bersama	1
	TOTAL		65

Sumber : SIPSAN, PMD Kota Tanjungpinang 2024

Menurut data tersebut, keseragaman dalam pengelolaan sampah di Tanjungpinang masih dianggap belum mencukupi karena pengangkutan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Kota Tanjungpinang terbatas pada rute yang dapat dilalui oleh truk besar di jalan protokol. Bagian dari wilayah yang tidak dapat dilalui oleh truk akan menjadi tanggung jawab camat atau lurah setempat yang mengatur pengangkutan, termasuk penyewaan jasa pengangkut sampah. Retribusi yang ditetapkan oleh DLH Kota Tanjungpinang hanya dibayar oleh pihak yang mendapatkan jadwal pengangkutan oleh fasilitas yang disediakan oleh DLH itu sendiri.

3.1.5 Responsivitas (*Responsiveness*)

Responsivitas dalam kebijakan mengacu pada sejauh mana kebijakan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, serta melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan (Dunn, 2018). Kebijakan harus dirancang dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan menyediakan saluran untuk partisipasi mereka. Untuk mengukur responsivitas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tanjungpinang dalam menangani masalah sampah, DLH telah mengimplementasikan fitur pengaduan lingkungan di situs web mereka, yang dikenal sebagai E-Lapor. Fitur ini memungkinkan masyarakat untuk mengajukan keluhan mengenai masalah sampah dan pencemaran. Pengaduan yang diterima akan diteruskan ke bagian terkait, seperti bagian persampahan, untuk ditindaklanjuti. Tim DLH kemudian akan memeriksa dan menanggapi pengaduan tersebut.

Gambar 1
Laman Website DLH Kota Tanjungpinang Untuk Membuat Laporan

Judul Aduan

Konten / Isi aduan

Lokasi

Rahasia? Anonim?

Sumber : dlh.tanjungpinangkota.go.id

Tersedianya layanan call center untuk masyarakat sehingga mereka dapat melaporkan masalah persampahan. Dari laporan yang diterima melalui website tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang akan segera menindaklanjuti. Namun, dari hasil wawancara dengan masyarakat, kurangnya sosialisasi mengenai keberadaan website ini menyebabkan sedikitnya kesadaran masyarakat tentang keberadaannya. Diinginkan agar Dinas Lingkungan Hidup meningkatkan upaya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap website tersebut.

3.1.6 Ketepatan (*Appropriateness*)

Ketepatan dalam evaluasi kebijakan publik mengukur sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang diinginkan secara akurat. Ini menunjukkan apakah kebijakan berhasil memenuhi sasaran yang ditetapkan dengan cara yang sesuai. Ketepatan sangat penting karena kebijakan yang tidak tepat sasaran dapat berdampak negatif secara ekonomi dan sosial, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam konteks evaluasi kebijakan, ketepatan memastikan bahwa tujuan yang diinginkan tercapai secara efektif dan efisien, serta sumber daya digunakan secara optimal. Ketepatan juga memastikan bahwa kebijakan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, menilai ketepatan kebijakan adalah kunci untuk memastikan bahwa pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan adalah sesuai dan efektif.

Tabel 11

Rentang Waktu Untuk Pembuangan Sampah di Kota Tanjungpinang 2024

NO	TEMPAT	WAKTU
1.	Tempat Pembuangan Sementara	16.00 WIB-07.00 WIB
2.	Transfer Depo Sampah	04.00 WIB-11.00 WIB 15.00 WIB-22.00 WIB

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang

Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang telah dirancang dengan tujuan dan target yang jelas dan mengatur prosedur dari sumber hingga tempat pembuangan akhir. Namun, meskipun kebijakan ini efektif dalam banyak hal, pelaksanaannya masih menghadapi kendala yang membuatnya belum optimal. Secara keseluruhan, kebijakan ini belum sepenuhnya efektif, efisien, cukup, adil, atau responsif. Namun, dari segi ketepatan, kebijakan ini sudah sesuai dengan tujuannya. Analisis triangulasi dari Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2015, Rencana Strategis DLH Kota Tanjungpinang, wawancara dengan enam narasumber, serta observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum mencapai hasil yang baik. Meskipun program pemilahan sampah dan fasilitas pembuangan dikelola dengan baik, masih ada warga yang tidak tertib dalam membuang sampah. Kendala utama termasuk kurangnya disiplin sebagian warga, fasilitas yang belum memadai, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga menghadapi kekurangan dalam sosialisasi dan tenaga kerja yang berkompeten. Pemanfaatan sumber daya yang ada juga belum optimal.

3.3 Diskusi Utama Penelitian

Perbandingan penelitian tentang pengelolaan sampah di beberapa wilayah dengan penelitian evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, menunjukkan beberapa persamaan dan perbedaan signifikan. Pertama, penelitian oleh Muhammad Rapii dkk. (2021) mengenai pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Rumbuk berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri. Penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan masyarakat sebesar 50,2%, namun implementasi di lapangan masih kurang efektif. Persamaan dengan penelitian ini adalah fokus pada pengelolaan sampah, tetapi perbedaannya terletak pada lokasi dan teori yang digunakan. Penelitian ini dilakukan di Desa Rumbuk, Nusa Tenggara Barat, menggunakan teori pengelolaan, sedangkan penelitian kami berlokasi di Kota Tanjungpinang dan menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn.

Kedua, skripsi oleh Rafael Tatibo (2018) membahas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende dalam pengelolaan sampah dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa kinerja dinas masih rendah dengan dampak minimal terhadap masyarakat. Persamaannya adalah keduanya berfokus pada pengelolaan sampah, tetapi perbedaannya terletak pada lokasi dan teori yang diterapkan. Penelitian Tatibo dilakukan di Kabupaten Ende dengan teori kinerja, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Tanjungpinang dengan teori evaluasi kebijakan.

Ketiga, jurnal oleh Junaidy dkk. (2021) mengevaluasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kapuas dengan menggunakan enam indikator evaluasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan daerah kurang maksimal, terutama dalam hal responsivitas. Persamaan dengan penelitian ini adalah fokus pada pengelolaan sampah dan penggunaan teori evaluasi, namun perbedaannya adalah lokasi penelitian yang dilakukan di Kabupaten Kapuas, sedangkan penelitian ini di Kota Tanjungpinang.

Secara keseluruhan, meskipun penelitian sebelumnya memiliki fokus yang sama dalam pengelolaan sampah, perbedaan terletak pada lokasi studi, teori yang digunakan, dan hasil evaluasi yang ditemukan. Penelitian ini menambahkan kontribusi penting dengan mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang, memperluas pemahaman mengenai efektivitas kebijakan di berbagai konteks dan memberikan dasar bagi penelitian lebih lanjut di bidang ini.

3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Diskusi tentang temuan utama penelitian evaluasi pengelolaan sampah di dinas lingkungan hidup kota tanjungpinang provinsi kepulauanriau menyoroti hambatan utama dalam evaluasi kebijakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di kota tanjungpinang provinsi kepulauanriau yaitu Pelaksanaan kebijakan di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau belum optimal terkait anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan sarana prasarana. Kekurangan dalam ketiga aspek ini menghambat efektivitas dan efisiensi kebijakan. Untuk memperbaiki situasi, beberapa langkah strategis perlu diambil. Pertama, edukasi masyarakat harus ditingkatkan melalui program yang terstruktur, termasuk kampanye mengenai pentingnya pemilahan sampah dan dampak lingkungan dari pengelolaan sampah yang buruk. Kedua, peningkatan sarana dan prasarana sangat penting, seperti memperbaiki fasilitas pembuangan, menambah armada pengangkut sampah, dan menyediakan lebih banyak tempat pembuangan sampah di lokasi strategis. Ketiga, penguatan SDM melalui pelatihan dan pendidikan bagi petugas kebersihan dan manajer pengelolaan sampah akan meningkatkan kapasitas dan efektivitas mereka dalam menangani masalah sampah. Keempat, peningkatan sistem pengelolaan sampah yang mencakup pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pembuangan atau daur ulang perlu diperbarui dengan penerapan teknologi modern dan sistem monitoring yang lebih ketat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih bersih dan sehat di Kota Tanjungpinang, mendukung pencapaian tujuan kebijakan secara keseluruhan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

IV. KESIMPULAN

berdasarkan teori evaluasi adalah kegiatan yang mengumpulkan informasi tentang bagaimana sesuatu bekerja dan berdasarkan itu menentukan alternatif yang tepat dalam pengambilan keputusan. (Rosenbloom, 2002). Pelaksanaan evaluasi pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, menunjukkan bahwa kinerja masih belum optimal dalam aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, dan ketepatan.

Program kebijakan pengelolaan sampah yang ada belum sepenuhnya terlaksana, dengan kekurangan dalam SDM yang kompeten dan kurangnya koordinasi dengan instansi terkait sebagai masalah utama. Meskipun anggaran yang digunakan hampir mencapai batas maksimal, hasil yang diharapkan belum tercapai, dan kegiatan penanggulangan bencana masih menghadapi hambatan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Kota Tanjungpinang telah mengambil beberapa langkah strategis. Pertama, edukasi masyarakat intensif dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pengelolaan sampah. Kedua, pemerintah berinvestasi dalam peningkatan sarana dan prasarana, termasuk fasilitas pengolahan sampah dan armada pengangkut, untuk mendukung pengelolaan yang lebih efektif. Ketiga, fokus pada penguatan SDM melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi petugas pengelolaan sampah bertujuan meningkatkan kinerja mereka. Keempat, sistem pengelolaan sampah diperbarui dengan perbaikan prosedur pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pembuangan sampah, serta penerapan teknologi modern dan sistem monitoring yang lebih ketat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang akan menjadi lebih efektif dan efisien, menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat, serta mendukung pencapaian tujuan kebijakan pengelolaan sampah secara keseluruhan.

Keterbatasan Penelitian. Keterbatasan penelitian ini meliputi beberapa hal yang penting untuk diperhatikan. Pertama, penelitian ini hanya mencakup Kota Tanjungpinang, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat diterapkan secara luas di wilayah lain. Kedua, meskipun data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, keterbatasan akses terhadap beberapa informan atau data dapat mempengaruhi analisis. Ketiga, waktu penelitian yang terbatas menyulitkan untuk memantau perubahan jangka panjang atau efek dari saran yang diberikan. Meskipun demikian, metodologi dan analisis data telah dirancang dengan cermat untuk meminimalkan dampak dari keterbatasan ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga tentang tantangan dan solusi dalam pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang, serta menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari adanya kekurangan dalam penelitian ini, sehingga diharapkan di masa mendatang akan dilakukan studi lanjutan yang menggali lebih dalam tentang evaluasi kebijakan Penanggulangan Bencana terkait kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung,

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Kami ingin menyampaikan penghargaan yang besar kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan semua pihak terkait atas dedikasi dan kerja keras dalam penelitian terkait evaluasi pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. Kerjasama dan komitmen dari semua pihak telah menjadi dasar keberhasilan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. In *Introducing English Language (Fifth)*. Singapore:

SAGE Publications Asia-Pacific Pte L.td. <https://doi.org/10.4324/9781315707181-60>

- Dunn, W. (2018). *Public Policy Analysis: An Introduction*. United States of America: Englewood Cliffs, Practice Halls Inc.
- Firmanti, Anita. (2010). *Modul Pengelolaan Sampah Berbasis 3R*. Bandung : Kementrian Pekerjaan Umum Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman.
- Nugroho, K. Y. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi SIKS-NG Untuk Pengolahan Data Kemiskinan di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. 1–40.
- Rosenbloom, H. D. (2002). *Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in The Public Sector.*, Firth Edition. New York: Mc-Graw-Hill.
- Saitullah, M. I. (2022). Correlation Of Population And The High Pollution Of Household Waste In Fakkie Village Pinrang Regency. *Continuum: Indonesian Journal Islamic Community Develpoment*, 1(1), 8-20.
- Simangungsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung.
- Sudijono, A. (2009). *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Rajawali P.
- Fernandes, S. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung, Alfabeta
- Moleong, L. J. (2019). *Meleong*.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Rapii, M., Majdi, M. Z., Zain, R., & Aini, Q. (2021). Pengelolaan Sampah Secara Terpadu Berbasis Lingkungan Masyarakat Di Desa Rumbuk. *Dharma Raflesia: Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan IPTEKS*, 19(1), 13-22.
- SUNASATO, Rafael Tatibo (2019) *Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende Dalam Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Di Empat Kecamatan Dalam Kota)*. Diploma thesis, Unika Widya Mandira
- Junaidy, J., Sugiannor, S., Anhar, D., Hamdie, A. N., & Saddiq, S. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kapuas. *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(2), 40-49.